

## Good Governance Pemerintahan Lokal: Penerapan Kepemimpinan dalam Pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe

Muhammad Nasir

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari

\*Corresponding Author, Email: [nasirmuh19@gmail.com](mailto:nasirmuh19@gmail.com)

---

### Abstrak

*Good governance* pemerintahan lokal pada penerapan kepemimpinan dalam pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Tujuan penelitian untuk mengetahui *good governance* pemerintahan lokal pada penerapan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa belum maksimalnya diterapkannya *good governance* pada pemerintahan desa. Penelitian deskriptif kualitatif dimana sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data dikategorisasi, reduksi dan interpretasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dicek kembali untuk memperjelas perilaku pemilih pada pemilihan kepala daerah langsung. Hasil penelitian *good governance* pemerintahan lokal pada penerapan kepemimpinan dalam pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe berupa akuntabilitas dengan mempertanggung jawabkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan serta adanya laporan-laporan kegiatan dan laporan keuangan. Tujuan prioritas dengan selalu memberi arahan dan program kerja serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. Partisipatif di wujudkan keikutsertaan masyarakat dengan memberi ide dan saran dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada program sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pembangunan dan prograam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi di desa baik dalam mengembangkan berbagai usaha-usaha industri rumah tangga, hasil-hasil pertanian dan keterampilan dimiliki masyarakat. Berkelanjutan wujudkan dimana berbagai program pembangunan tetap dilaksanakan terus menerus dan adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Kepemimpinan, Pembangunan, Pemerintahan Lokal.

---

### PENDAHULUAN

Munculnya ortodoksi *governance* secara empirik merupakan respons terhadap bad government atau soft state. Fenomena ini antara lain ditandai dengan kuatnya personalisasi kekuasaan, otoritarianisme, sentralisasi, korupsi, patronase, kemiskinan, kebijakan, kegagalan negara, krisis finansial negara. *Good governance* setidaknya memiliki karakteristik utama yaitu: partisipatif, transparan dan tanggung jawab, efektif dan berkeadilan, mempromosikan supremasi hukum, memastikan bahwa prioritas (sosial, ekonomi, dan politik) didasarkan pada konsensus dalam masyarakat, memastikan bahwa suara penduduk miskin, dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan.

Hakekat dari demokrasi secara minimal ada tiga: pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung yang dalam istilahnya ringkasnya partisipatif, berjalannya kompetisi secara fair dan diskriminitif. Serta terakhir dijaminnya kebebasan sipil seperti hal untuk bersuara, berserikat dan berkumpul. Secara prinsip pelibatan

berbagai *stake holders* yang luas demokrasi juga berjalan dengan beberapa prinsip yaitu: (1) akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan pada masyarakat, (2) transparan, penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka ke publik, (3) responsivitas, tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, (4) *rule of law*, bersandar pada kesepakatan dan aturan main.

Konsep *government* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sector di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Ganie Meuthia Rochman (2000), *good governance* adalah cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara termasuk Indonesia. *Good governance* diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan ayanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan dan adminitrasinya bertanggung jawab pada publik. *Governance* diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan dan warga meng-

atur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis prinsip tata pengelolaan yang baik (*good governance*) adalah adanya kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Indikator ini tercapai bila pemerintah dapat membangun mekanisme pemerintahan demokratis yang tanggap pada kebutuhan daerah. Dalam rangka itu, perlu diberi peningkatan tekanan lebih banyak kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat pada tingkat lokal, dalam hal ini pemerintahan desa.

Mendorong dan menggerakkan potensi sumber daya aparat serta masyarakat dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah kerjanya bagi kepentingan pembangunan dan organisasi, maka mutlak diperlukan kepemimpinan camat yang mampu dan aktif mengkoordinasikan berbagai tugas dan kegiatan organisasi dimana tugas-tugas tersebut merupakan tanggung jawab moral dalam kedudukannya selaku pemimpin.

Seorang pemimpin mempunyai baik keterampilan manajemen (*managerial skill*) maupun keterampilan teknis (*technical skill*). Semakin rendah kedudukan seorang teknisi pemimpin dalam organisasi maka keterampilan lebih menonjol dibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional. Bertambah tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas bersifat konseptual. Dengan perkataan lain semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka semakin dituntut dari padanya kemampuan berfikir secara konseptual strategis dan makro. Di samping itu perlu dikemukakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi maka ia semakin generalist, sedang semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi maka ia menjadi specialist.

Seorang pemimpin merasa berkewajiban untuk mengembangkan bawahannya, maka pada saat dia menjabat sebagai pemimpin, pada saat itu sudah memikirkan berbagai hal mengenai bawahannya. Sementara itu dalam pelaksanaan suatu kegiatan di instansi pemerintah, selalu terlihat adanya pelimpahan tugas dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan

suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi terutama pencapaian konsep *good governance*.

Herujito (2006) mengemukakan bahwa pimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu walaupun tidak ada kaitan-kaitan formal dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi atau usaha baik itu didunia bisnis maupun di dunia pendidikan, pemerintahan, sosial, dan lain sebagainya. Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela.

Mulyadi (2010) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

1. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
2. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
3. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk "membaca" situasi.
4. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.
5. Kehidupan organisasi yang manis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan cara berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut James (2003) tugas utama seorang pemimpin adalah:

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain  
Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi.
2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas).

Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan prioritas

Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif.

4. Pemimpin harus berfikir secara analitis dan konseptual

Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.

5. Pemimpin adalah seorang mediator

Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).

6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat

Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.

7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit

Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

Menurut Henry (2003) Peran Kepemimpinan adalah:

1. Peran hubungan antar perorangan, dalam kamus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangunan tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
2. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
3. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Santoso (2009) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan

tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Setiap orang mempunyai pengaruh atas pihak lain, dengan latihan dan peningkatan pengetahuan oleh pihak maka pengaruh tersebut akan bertambah dan berkembang. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam wujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dewasa ini kebanyakan para ahli beranggapan bahwa setiap orang dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya dalam tingkat tertentu.

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang dipimpin menurut *rules of the game* yang telah disepakati bersama. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya.

Mengenai tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, factor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, factor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Adapun pembangunan pada pemerintah di Desa merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Konsep pembangunan di desa

diperlukan penerapan prinsip-prinsip yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dinamis dan terkoordinasi. Dengan demikian perlu keseimbangan antara peranan dan kewajiban pemerintah dalam berbagai tingkatan dengan peran aktif dari masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya, kreatifitas dan inovatif dari masyarakat.

Pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Soetarto (2006) bahwa suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan masyarakat itu dari suatu masyarakat untuk mandiri. Ini memberikan penjelasan bahwa kemauan masyarakat itu untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat.

Pembangunan harus dipahami sebagai upaya proses perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Hal ini harus dilakukan mengingat sasaran dan prioritas pembangunan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perubahan struktur ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang berjalan dinamis, terus menerus secara berencana serta bergerak maju menuju pencapaian tujuan dan didukung oleh sumber daya manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Kamarsya (2001) mengatakan bahwa pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu mencakup tiga hal. Pertama, kecukupan dan kemandirian lahiriah seperti pangan, sandang, papan, pendapatan yang layak dan sebagainya. Kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, kerukunan sosial, ketentraman beragama dan sebagainya. Ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh masyarakat sebagaimana tercermin dalam perbaikan kesejahteraan hidup yang terkendalikan.

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan desa menitikberatkan pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan serta melembaga. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan Awalodin Surjadi (2000) bahwa inti sari pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan desa didasarkan atas partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya desanya.
2. Pembangunan desa dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terarah.
3. Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa.

## METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian dilaksanakan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Jenis wawancara berupa wawancara terbuka dimana yang diwawancarai mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud yang diwawancarai. Berbagai tanggapan masyarakat dicek kembali (*cross check*) untuk mendiskripsikan penerapan *good governance* pada pemerintahan lokal di Di Desaa Epee'a

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yang ada adalah: (1) kategorisasi, dimana data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk di analisa, (2) Redksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk di-analisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian, (3) interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, member tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian. Moleng J.L (2015) dimana analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## PEMBAHASAN

Wujud *good governance* dalam konteks pemerintahan lokal adalah terlaksananya urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang

profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.

Untuk mampu melaksanakan tugas dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan dalam suatu lingkungan kerja. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar. *Good governance* pemerintahan lokal pada penerapan kepemimpinan dalam pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas

Keterkaitan dalam pelaksanaan *good governance* dimana kepemimpinannya harus melaksanakan akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai *outcome* yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.

Pencapaian dan keberhasilan organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari peran sumber daya aparatur dalam pengelolaan manajemen organisasi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dengan menggerakkan fungsi-fungsi yang mencakup fungsi pengorganisasian dan pergerakan yang transparan dan akuntabel. Hal menjadi tanggung jawab pimpinan dan staf dalam menyelenggarakan kegiatan. Pencapaian hasil yang baik dalam suatu organisasi kerja, berada pada kunci kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan dapat menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya kepemimpinan yang buruk akan menjadikan hambatan yang besar terhadap pencapaian tujuan dari setiap organisasi.

Berbagai kegiatan dan program pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Kinerja aparatur didukung oleh sikap, perilaku dan etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Aplikasi *good governance* selama ini belum dapat tercapai hasilnya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Sementara itu perwujudan pemerintahan yang baik

telah dikomandangkan di seluruh instansi pemerintah sejak dicetuskannya otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang baik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan peranan pemimpin daerah yang mampu melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan dan bekerja sama dengan para staf yang menjadi rekan kerjanya.

Diperlukan inisiatif dari pemimpin untuk mempengaruhi atau menggerakkan bawahan. Aktivitas menggerakkan bawahan bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab setiap bawahan mempunyai latar belakang, persepsi dan harapan yang berbeda beda untuk itu seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada bawahannya supaya mereka bersedia bekerjasama demi kepentingan organisasi, maka salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja adalah kemampuan menampilkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, khusus yang menyangkut tingkat kematangan bawahan dalam bekerja.

Hasil wawancara informan mengenai akuntabilitas sebagaimana dikatakan bahwa wujud *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Epee'a berupa akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan dan memberika informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan serta adanya laporan-laporan kegiatan dan laporan keuangan. Dengan demikian, wujud *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Epee'a berupa akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan serta adanya laporan-laporan kegiatan dan laporan keuangan.

### 2. Tujuan Prioritas

Inti dari konsep *good governance* adanya keseimbangan dan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini dimaknai untuk mendapatkan keseimbangan pencapaian tujuan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif.

Kaitan tugas-tugas organisasi yang pada hakekatnya melibatkan unsur pimpinan dan bawahan sebagai pelaksana tugas-tugas sehingga menentukan berhasil

tidaknya suatu organisasi sebab kepemimpinan yang sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan dengan sukses pula. Tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik apabila pegawai patuh terhadap sistem kerja yang ada karena dengan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan sistem kerja yang ada memudahkan pegawai menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga memperoleh prestasi kerja begitu pula mengenai organisasi desa yang otonom dalam pelaksanaan pembangunan. Peran kepemimpinan ditunjukkan dalam suatu proses kegiatan seseorang dalam membina, menimbang, mempengaruhi dan mengontrol pikiran dan perasaan orang-orang yang dipimpinya.

Terjadinya suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pimpinan dan anggota kelompok secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan inti merupakan daripada kepemimpinan sebagai sumber inspirasi bagi bawahan.

Hasil wawancara dengan informan mengenai pencapaian tujuan prioritas sebagaimana dikatakan bahwa salah satu implementasi dari *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Epee'a berupa tujuan prioritas dengan selalu memberi arahan dan program kerja serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, salah satu implementasi *good governance* di Desa Epee'a berupa tujuan prioritas dengan selalu memberi arahan dan program kerja serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat.

### 3. Partisipatif

Salah satu indikator dari *good governance* berupa partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya desanya Pembangunan bukan hanya milik untuk sekelompok orang, akan tetapi pembangunan adalah milik semua. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kondisi yang kondusif dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Sangat diperlukan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan hal ini disebabkan keberhasilan penyediaan dan perbaikan pada suatu desa akan dilihat dari seberapa banyak sarana dan prasarana fisik yang tersedia di desa tersebut. Pada dasarnya semakin banyak prasarana dan sarana fisik yang tersedia maka semakin baik pula tingkat penyediaan dan perbaikan yang ada di desa tersebut.

Demikian pula hasil wawancara dengan informan mengenai partisipatif, dimana dikatakan bahwa partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Epee'a di wujudkan keikutsertaan masyarakat dengan memberi ide dan sarana dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada program sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pembangunan dan prograam pemberdayaan masyarakat. Implementasi *good governance* di Desa Epee'a berupa partisipatif di wujudkan keikutsertaan masyarakat dengan memberi ide dan saran dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada program sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pembangunan dan prograam pemberdayaan masyarakat.

### 4. Pemberrdayaan

*Good governance* mengarahkan adanya berbagai program-program pemberdayan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terarah Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada kekuatan manusia dan struktur sosialnya. Pada pelaksanaan pembangunan dengan pemberdayaan diharapkan akan semakin baiknya kepribadian dan mental spritual masyarakat sehingga hubungan dan pergaulan dalam masyarakat semakin baik pula.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah kondisi masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarha dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Penyelenggaraan program pemberdayaan di Desa Epee'a antara lain: pembinaan usaha kecil (home

industri), melalui pengelolaan dana bergulir, pembinaan kelompok usaha bersama, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian/perkebunan, TPA, pelatihan pertukangan. Pelaksanaan pembangunan dengan memberikan motivasi keagamaan bagi masyarakat agar mendapatkan mentalitas rohani yang sehat dan kuat dalam menghadapi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan berupa pemberdayaan, dimana dikatakan bahwa program pemberdayaan di Desa Epee'a dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi di desa baik dalam mengembangkan berbagai usaha-usaha industri rumah tangga, hasil-hasil pertanian dan keterampilan dimiliki masyarakat. Implementasi *good governance* di Desa Epee'a diwujudkan program pemberdayaan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi di desa baik dalam mengembangkan berbagai usaha-usaha industri rumah tangga, hasil-hasil pertanian dan keterampilan dimiliki masyarakat.

## 5. Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Usaha sadar untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik, dilakukan secara intensif untuk dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat, dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas sebagai upaya pembinaan bangsa

Adanya berbagai aktivitas pembangunan berkelanjutan semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya semakin memerlukan kemampuan dalam berbagai aspek sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Pembangunan telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut di satu sisi mendorong suatu pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat dan disisi lain perubahan yang timbulkan oleh pembangunan dapat berakibat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan mengenai berkelanjutan, dimana dikatakan bahwa implementasi berkelanjutan di Desa Epee'a berupa dimana berbagai program pembangunan tetap dilaksanakan terus menerus dan adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Implementasi *good governance* di Desa Epee'a dengan berkelanjutan wujudkan dimana

berbagai program pembangunan tetap dilaksanakan terus menerus dan adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

## KESIMPULAN

*Good governance* pemerintahan lokal pada penerapan kepemimpinan dalam pembangunan di Desa Epee'a Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe berupa akuntabilitas dengan mempertanggung jawabkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan serta adanya laporan-laporan kegiatan dan laporan keuangan. Tujuan prioritas dengan selalu memberi arahan dan program kerja serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. Partisipatif diwujudkan keikutsertaan masyarakat dengan memberi ide dan saran dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada program sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pembangunan dan prograam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi di desa baik dalam mengembangkan berbagai usaha-usaha industri rumah tangga, hasil-hasil pertanian dan keterampilan dimiliki masyarakat. Berkelanjutan wujudkan dimana berbagai program pembangunan tetap dilaksanakan terus menerus dan adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry. (2003). *Peran Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- James. (2003). *Manajemen Strategik dan Teori Kepemimpinan Efektif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamarsya. (2001). *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bandung: PT. Angkasa.
- Mulyadi. (2010). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleng J. L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rochman. G.M. (2000). *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi*



*Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik).*

Jakarta: Komnas HAM.

Sastropetro, Santoso, R.A. (2009). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Soetarto. (2016). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sugiono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, Awaluddin. (2000). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Alumni.